
OPTIMASI NILAI-NILAI PANCASILA DI ERA VUCA PERSPEKTIF STRATEGI PERANG SEMESTA

Oleh

Mulyadi¹⁾ & Lukman Yudho Prakoso²⁾^{1,2}Universitas Pertahanan IndonesiaEmail: [1mulyadi.zi98@gmail.com](mailto:mulyadi.zi98@gmail.com) & [2lukman.prakoso@idu.ac.id](mailto:lukman.prakoso@idu.ac.id)**Abstract**

The development of science and technology, at certain level evolves to an all-digital world. The environment experiences a state of VUCA, which is full of Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity, which are believed to make humans and their environment very vulnerable. Furthermore, with the world entering the era of non-conventional warfare and war by proxy, the real threat to national security does not come from armed invasions, but in the form of ideological attacks by using Non-State Actors to attack the Indonesian Center of Gravity (COG), namely the Unity of Indonesia. However, throughout 2020 there were several incidents of conflict between residents in the National Capital area, Jakarta. This study aims to optimize the unity and integrity of the nation from the perspective of a universal war strategy. The Writing using descriptive qualitative research method, using data sources from reports, printed media, and online media. The results of research on the optimization of unity and integrity from the review of the universal war strategy, Indonesia absolutely needs a universal strategy in order to maintain the "Central of Gravity" of Indonesian Unity and Integrity.

Keywords: Pancasila, Indonesian Unity, Volatility Uncertainty Complexity and Ambiguity (VUCA), Total War Strategy, dan Centre of Gravity (COG).

PENDAHULUAN

Secara etimologi kata persatuan berasal dari kata "satu" artinya utuh, sesuatu yang tidak terpisah. (Pusat Bahasa, 2008), Persatuan artinya gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah Bersatu. Kesatuan berarti perihal satu, tidak terpecah-belah, keadaan utuh, dan gabungan keterpaduan dari keanekaragaman.

Persatuan Indonesia merupakan bunyi sila ketiga Pancasila. Sesuai norma sila tersebut, bangsa Indonesia adalah bangsa multi etnis, budaya, suku, agama, ras dan golongan yang digabungkan menjadi satu ikatan persatuan. Dari pengertian persatuan yang artinya tidak dapat diceraiberaikan, dan menggabung menjadi satu sehingga akan terhindar dari perpecahan bangsa atau disintegrasi bangsa.

Mencermati realitas sepanjang Tahun 2020, di Jakarta sebagai ibukota negara dan miniatur Indonesia, masih dijumpai benih-

benih pemecah belah persatuan kesatuan yang berbentuk perkelahian antar warga. Di wilayah administrasi Jakarta Selatan, tercatat sepanjang 2020 telah terjadi 5 (lima) Perkelahian atau konflik antar warga.

Tentunya kita juga masih ingat beberapa konflik besar di Indonesia yang melumpuhkan rasa persatuan Indonesia. Konflik tersebut biasanya dipicu hal sepele tetapi kemudian dapat menyulut konflik sosial yang masif dan menimbulkan banyak korban harta, benda dan jiwa. Konflik-konflik yang menciderai persatuan Indonesia tersebut antara lain; Konflik Ambon Tahun 1999, Konflik kekerasan di Lampung Selatan Tahun 2012, Konflik Sampit Tahun 2001, dan konflik lainnya yang mencabik rasa persatuan dan kesatuan Indonesia

Dampak yang ditimbulkan dari konflik, perkelahian dan kerusuhan antar warga tersebut tentunya sangat masif yaitu antara lain hilangnya kenyamanan, keamanan dan

ketertiban masyarakat. Dampak lainnya yaitu image negatif wajah ibukota negara dan umumnya Indonesia yang tentunya dapat mempengaruhi iklim investasi / perekonomian. Dampak yang lebih besar adalah adanya potensi kejadian yang lebih luas serta memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisa permasalahan perkelahian antar warga yang terjadi di Jakarta Selatan dan sebagai sumbangsih saran pemecahan permasalahan optimasi sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia dengan pendekatan strategi perang semesta.

LANDASAN TEORI

Carl Von Clausewitz, dalam buku “*On War*” mengemukakan bahwa strategi adalah seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Strategi, secara harfiah berarti “Seni Umum” (dari Bahasa Yunani Strategos) dan pada mulanya menandakan perencanaan kampanye militer secara murni.(Clausewitz, 1976).

Strategi menurut definisi Liddel Hart adalah “*the art of distributing and applying military means to fulfill the ends of policy*” (Marsono & Legionosuko, 2020). Strategi adalah seni menggunakan (ways) sarana militer (means) untuk mewujudkan tujuan final (ends). Dengan demikian mencermati beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menentukan tujuan (ends), merumuskan langkah-langkah yang ditempuh (ways) dan menentukan alat perlengkapan (means) yang digunakan untuk mennggapai tujuan.

Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara dan sumber daya nasional lainnya guna menghadapi segala ancaman.(Undang-undang Nomor 3, 2002). Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta berarti bercirikan kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan. (Kementerian Pertahanan RI, 2015).

Pengertian Perang Semesta yaitu perang yang tidak harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara militer. Mengingat ancaman terhadap kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah Indonesia, tidak hanya berasal dari kekuatan militer “luar negeri” tetapi juga bisa berasal dari kelompok di dalam negeri.(Prabowo, 2009). Perang semesta sama sekali beda dengan Total War, karena Total War secara keseluruhan menggunakan kekuatan milter dan dikategorikan sebagai perang generasi ketiga. Sedangkan Perang Semesta dapat dikategorikan perang generasi ke-empat. Ciri terpenting perang generasi ke-empat melibatkan 2 aktor atau lebih dengan kekuatan yang tidak seimbang dan mencakup spektrum pertikaian perang yang besar dan luas (Mustarom, 2014).

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk: meringkaskan, menggambarkan, berbagai keadaan atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi sasaran penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun pada fenomena tertentu (Bungin, 2007). Realitas perkelahian atau tawuran di wilayah Jakarta Selatan yang notabene di Ibukota Negara memerlukan perhatian dan upaya penyelesaian sesegera mungkin dan bersifat menyeluruh atau semesta agar tidak menjadi pembiasaan di daerah-daerah lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila sebagai *Philosofische Grondslag*.

Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme di zaman modern pada umumnya dipahami bersandar pada tiga elemen kesepakatan, yaitu: kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama, Kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-

prosedur ketatanegaraan. (Asshiddiqie, 2006). Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag*, artinya Pancasila diinterpretasikan sebagai falsafah hidup bangsa dan sebagai ideologi Negara Indonesia. (Muin, Fatkhul & Karsa, 2017).

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dasar-dasar filosofis yang dimaksudkan disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila untuk mewujudkan 4 tujuan berbangsa dan bernegara. Lima (5) prinsip dasar Pancasila itu mencakup; Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa; Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab; Ketiga, Persatuan Indonesia; Keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima dasar tersebut dipakai sebagai dasar filosofis untuk mewujudkan empat tujuan bernegara, yaitu: meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial.

Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia, memiliki simbol lambang pohon beringin. Pada dasarnya pohon beringin melambangkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan akar pohon beringin ibarat etnis di Indonesia. Digambarkan walaupun pohonnya besar dan banyak cabang, akan tetapi akar-akar tersebut tetap bersatu untuk menopang pohon beringin dalam mengarungi ancaman dari lingkungan. Demikian juga, walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai etnis, agama, sukudan golongan namun persatuan dan kesatuan Indonesia harus selalu dijunjung tinggi.

Ancaman terhadap Nilai-Nilai Pancasila di Era VUCA.

Ancaman merupakan setiap upaya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang berseberangan dengan dasar negara Pancasila dan mengancam keselamatan negara. Berdasarkan jenisnya, ancaman terdiri atas

ancaman potensial dan ancaman aktual. Ancaman aktual dapat berupa ancaman hibrida, militer, dan ancaman nonmiliter. Ancaman potensial merupakan ancaman yang belum terjadi (Kementerian Pertahanan, 2020).

Pada saat teknologi informasi berevolusi dan digitalisasi menjadi anak kandungnya, dunia mengalami keadaan VUCA, yaitu gampang bergejolak (*Volatility*), ketidakpastian (*Uncertainty*), njelimet (*Complexity*), dan serba buram (*Ambiguity*) yang disebut akan membuat manusia jadi rapuh (Bakrie, 2020). Selanjutnya disusul dunia memasuki era *war by proxy* (perang dengan negara atau aktor antara/boneka).

Dalam peperangan generasi Ke-5, peperangan merupakan kelanjutan dari peperangan generasi ke-4, yaitu merupakan peperangan yang melibatkan aktor negara melawan aktor non negara. Yang tidak sama dalam peperangan generasi keempat dan kelima adalah keterlibatan dari kelompok teroris yang menjadi musuh negara dalam melakukan kegiatan kriminal. Peperangan generasi ke-5 ditandai munculnya *cyberwarfare* dan *Information warfare* (Octavian, 2012). Dampak dari perang ini menimbulkan ancaman siber terhadap Infrastruktur informasi kritis nasional (IIKN) (Lebo & Anwar, 2020)

Mencermati beberapa argumen diatas, ancaman real atas ketahanan nasional Indonesia tidaklah berasal dari invasi menggunakan senjata, melainkan lebih dekat terhadap serangan ideologi dan “kekuatan lunak” bangsa. Hal ini dilakukan dengan menggunakan “*Non-state Actor*” untuk menyerang *Center of Gravity (COG)* yaitu persatuan dan kesatuan Indonesia. Dari potensi ancaman potensial yang paling mungkin tersebut, sangat urgen untuk menguatkan Pancasila sebagai moral publik dan ideologi negara, sehingga dibutuhkan komitmen menjaga persatuan dan kesatuan sesuai dengan tantangan perkembangan zaman.

Memperhatikan realitas sepanjang tahun 2020, di Jakarta sebagai ibukota negara dan miniatur Indonesia, masih dijumpai benih-benih pemecah belah persatuan yang berbentuk

konflik antar warga. Tercatat sepanjang 2020 telah terjadi 5 (lima) Perkelahian atau tawuran antar warga. Tawuran antar warga di wilayah Jakarta Selatan tersebut antara lain terjadi;

- a. Tanggal 1 April 2020, terjadi tawuran antar warga di jalan Bedeng, Kel. Mangarai, Kec. Tebet. Dampak yang ditimbulkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dan berpotensi memicu kejadian yang lebih luas.
- b. Tanggal 5 April 2020, terjadi tawuran / perkelahian antar warga di Jalan KH. Abdullah Syafei RT 03 RW. 01. Kel. Kebon Baru. Kec Tebet. Dampak kejadian 1 (satu) Orang mengalami luka di bagian dada.
- c. Tanggal 18 April 2020, terjadi tawuran antar warga di Jalan mangarai utara, dampak yang diakibatkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dan berpotensi memicu kejadian yang lebih luas.
- d. Tanggal 21 April 2020, terjadi perkelahian antar warga di manggarai antara warga Menteng jaya dengan warga kelurahan Manggarai, Kec. Tebet. Dampak yang ditimbulkan terganggunya kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dan berpotensi memicu kejadian yang lebih luas serta memecah persatuan dan kesatuan di Ibukota negara.
- e. Tanggal 23 Agustus 2020, terjadi tawuran antar warga di Jembatan Tongtek, tebet antara warga kampung melayu dan Kampung Pulo.

Tentunya kita juga masih ingat beberapa konflik besar di Indonesia yang melumpuhkan rasa persatuan Indonesia. Konflik tersebut biasanya dipicu hal sepele tetapi kemudian menyulut konflik sosial yang masif dan menimbulkan banyak korban harta, benda dan jiwa. Konflik-konflik yang menciderai persatuan Indonesia tersebut antara lain;

- a. Konflik Ambon tahun 1999, konflik sosial bernuansa agama pecah dan memporak-porandakan tradisi Pela

Gandong di Maluku. Lebih kurang 9.000 orang kehilangan nyawa akibat pertikaian yang tak jelas pangkal dan ujungnya itu dan serasa kiamat kecil.(Herin, 2019)

- b. Konflik dengan disertai kekerasan yang terjadi di Lampung Selatan, mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan 1.700 warga mengungsi. Kekerasan ini berlangsung dalam kurun waktu 3 hari yaitu tanggal 27 sampai 29 Oktober 2012 (Kurniadi et al., 2019).
- c. Konflik yang menciderai Sila ke 3 (tiga) Pancasila lainnya yaitu Konflik Sampit tahun 2001, tercatat korban meninggal dunia mencapai sekitar 400 jiwa dan memaksa 800.000 orang keluar dari bumi Kalimantan.(Cahyono, 2004)

Keberadaan Satuan Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. (Undang-Undang Nomor 34, 2004). Dalam melaksanakan tugas pokok dan tugas lainnya tersebut, TNI AD melaksanakan 3 (tiga) fungsi utama TNI AD, yaitu: pertempuran, pembinaan teritorial dan pembinaan postur.

Menurut hirarkinya, Komando Teritorial TNI AD dimulai dari Babinsa (Bintara Pembina Desa), Koramil (Komando Rayol Militer), Kodim (Komando Distrik Militer), Korem (Komando Resor Militer) dan Kodam (Komando Daerah militer). Babinsa (Bintara Pembina Desa) merupakan aparat satuan komando kewilayahan di tingkat Desa atau kelurahan. Struktur satuan Komando Kewilayahan memiliki susunan yang paralel dengan organisasi pemerintahan.(Said, 2006). Dengan demikian, Satkowil TNI AD dapat berperan secara efektif sebagai 'peringatan dini' dengan ujung tombak Koramil dan Babinsa. Satuan Komando kewilayahan TNI AD yang tergelar dan berada di seluruh pelosok Nusantara. Wilayah Indonesia meliputi Aceh sampai dengan Papua, yang sejak tahun 1963

merupakan bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Mulyadi & Risman, 2020).

Mencermati ragam Suku, Agama, Ras dan Golongan di Indonesia, khususnya di Ibukota negara Jakarta. membuat potensi konflik social dengan memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa merupakan ancaman yang paling potensial.

Pengetahuan umum aparat Satuan Komando Kewilayahan TNI AD.

Personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD disamping memiliki pengetahuan Pembinaan Teritorial, juga memiliki pengetahuan umum tentang Pancasila. Dengan telah diterimanya Pancasila sebagai ideologi negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi sendi kehidupan di masyarakat.

Adapun pengetahuan umum tentang nilai-nilai luhur dalam Pancasila yang sudah menjadi urat nadi aparat Satkowl TNI AD adalah sebagai berikut:

a. Nilai luhur Ketuhanan.

Nilai luhur Ketuhanan memiliki arti yaitu pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, menghormati kebebasan memeluk agama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif beragama. Nilai Ketuhanan Yang maha Esa mengandung arti pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai penciptaalam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia yang religious bukan atheis.

b. Nilai luhur Kemanusiaan.

Nilai luhur kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti bahwa segala sesuatu harus diberlakukan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama dan hati Nurani.

c. Nilai Persatuan.

Nilai luhur persatuan Indonesia mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui keberagaman Suku, Agama, ras dan golongan yang hidup di Indonesia. Hal ini selalu diusahakan kearah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa

nasionalisme dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Nilai Kerakyatan.

Nilai luhur kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung arti bahwa suatu negara demokrasi memiliki sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan mengutamakan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

e. Nilai Keadilan.

Nilai luhur keadilan sosial bagi seluruh rakyat memiliki arti sebagai dasar negara sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Strategi Optimasi nilai - nilai Pancasila.

Strategi terdiri dari tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai (*Ends*), metode dan cara pencapaiannya (*Ways*), serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki/yang harus dimiliki (*Means*). Perspektif Strategi Perang Semesta dapat digunakan untuk mengatasi konflik komunal atau konflik antar komunitas yang berpotensi merusak persatuan dan kesatuan sudah dilaksanakannya oleh satuan Komando Kewilayahan dengan Kepolisian dan pemerintah setempat.

Sedangkan, Optimasi, berasal dari kata Optimize, “to make something as good as possible” atau merupakan upaya atau cara untuk memperoleh hasil yang terbaik. (Cambridge Dictionary, n.d.). Optimasi merupakan suatu prosedur untuk mencapai hasil yang baik atau optimal (nilai efektif yang dapat dicapai). Sehingga Optimasi dapat dipahami sebagai suatu usaha mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada sebelumnya dan dibuat menjadi lebih optimal.

Sesuai dengan doktrin teritorial, diperlukan persiapan terhadap unsur Ruang, Alat dan Kondisi Juang atau RAK Juang. Hal tersebut memerlukan strategi yang jitu sehingga dapat menimbulkan *Deterrence Strategy* (Supriyatno, 2014). Dalam rangka memaksimalkan peran Satkowl meniadakan konflik-konflik dimasa mendatang, penulis

mencoba menganalisa dan mengaplikasikan strategi perang semesta optimasi nilai Pancasila, terutama sila ke-3 Persatuan Indonesia.

Ends (Tujuan).

Tujuan keberadaan satuan Komando Kewilayahan adalah melaksanakan tugas-tugas dari fungsi utama pembinaan teritorial, salahsatunya yaitu melaksanakan perbantuan kepada Kabupaten/ Kota untuk tugas perbantuan mengatasi akibat bencana alam, bencana kemanusiaan, mengatasi pengungsian, rehabilitasi infrastruktur dan membantu menaggulangi akibat pemogokan massal serta konflik komunal lainnya.

Guna mencapai tujuan mencegah konflik komunal atau konflik antar komunitas yang berlatar Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA) di Ibukota negara dan daerah, diperlukan optimasi pengamalan sila 3 (Ketiga) Persatuan Indonesia yang mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan Indonesia juga mengandung makna usaha kearah "Satu" Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Means (Alat/Sarana/Prasarana).

Dalam rangka mencapai tujuan (*ends*) optimalisasi nilai Pancasila, terutama sila ke-3 Persatuan Indonesia, maka Satkowil TNI AD perlu melaksanakan beberapa langkah perubahan dengan berbasis pada 3 sarana/sumberdaya, yaitu :

- a. Memutakhirkan Buku petunjuk dan aturan yang terkait. Pada era demokrasi saat ini, tujuan (*Ends*) tidak dapat terwujud tanpa didukung dengan peraturan perundangan. Untuk mencapai *endstate* yang diharapkan maka perlu dimulai dengan pemutakhiran Perundang-undangan, Doktrin, Aturan dan Buku-buku tentang Pancasila, terutama sila ke-3 Persatuan Indonesia. Tulisan aplikatif lainnya yang dapat disimpan sebagai File/bacaan aplikatif ketengah-tengah masyarakat, sehingga membantu aparat satuan Komando

Kewilayahan Angkatan Darat berkomunikasi dengan perkembangan lingkungan nya.

- b. Memodernisasi alat komunikasi dan sarana pendukung lainnya. Untuk mewujudkan tujuan diatas diperlukan modernisasi alat perhubungan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan sarana pendukung lainnya untuk mengimbangi perkembangan doktrin dan kemajuan teknologi. Pengadaan alat komunikasi selayaknya mengikuti perkembangan masyarakat binaan, segingga aparat teritorial tidak "Gaptek" gagap teknologi.
- c. Membangun kompetensi SDM. SDM merupakan salah satu aset pokok dalam organisasi. Oleh karenanya kompetensi yang diwujudkan melalui kapabilitas SDM yang tinggi sangat diperlukan untuk mengawaki lingkungan yang modern serta guna membentuk kapabilitas aparat teritorial yang mampu beradaptasi dengan perkembangan iptek dan kecenderungan potensi ancaman. Dalam upaya mengoptimalkan kemampuan Komunikasi sosial, memerlukan sarana program kerja dan jadwal mingguan yang terperinci dan konsisten dilaksanakan, diawasi, dievaluasi dengan baik kegiatan program optimalisasi pengamalan sila 3 persatuan Indonesia. Para babinsa di lengkapi dengan alat perorangan yang menunjang dalam berinteraksi dengan masyarakat secara aplikatif dan memadai sesuai tipologi masyarakat perkotaan dan perkembangan jaman Era industri 4.0.

Ways (Metode/Cara Bertindak)

- a. Memberi ruang pentingnya pembinaan teritorial Era VUCA. Pada saat teknologi informasi berevolusi dan dunia digital menjadi aktifitas setiap saat, dunia mengalami keadaan VUCA, yaitu penuh gejolak (*Volatility*), ketidak pastian (*Uncertainty*), njelimet (*Complexity*), dan buram (*Ambiguity*) yang disebut akan

membuat persatuan Indonesia menjadi rentan.

Teknologi perhubungan yang diharapkan mempermudah kehidupan, pada banyak kasus menimbulkan kesulitan dan permasalahan baru yang tidak ditemukan dalam jaman sebelumnya. Guna mencegah, mengantisipasi dan mengatasi dampak dari potensi kedaruratan yang dibawa oleh VUCA, maka keberadaan pembinaan Teritorial dituntut untuk lebih mampu berperan.

Negara dalam kedaruratan AGHT di era VUCA ini pada poros terdalamnya harus terwakili keberadaannya oleh peran satuan komando kewilayahan di segenap pelosok wilayah Indonesia. Kehadiran mereka supaya dapat mengkonversi kerentanan/kerapuhan persatuan Indonesia menjadi kekuatan persatuan Indonesia dengan menciptakan kekuatan kolaboratif antara satuan Komando kewilayahan dengan potensi lingkungannya.

Negara dituntut belajar menanggapi, juga mengelola perubahan dan mengatasinya di tengah lingkungan yang labil serta penuh ketidakpastian / Uncertainty dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi secara efektif dan tepat guna.

Selanjutnya, Complexity atau masalah berkepanjangan mengharuskan negara mampu mengatasi dengan menghubungkan titik-titik permasalahan penyebab konflik yang menciderai rasa persatuan dan kesatuan bangsa yang terdeteksi dan menyelesaikannya satu per satu secara tuntas. Terakhir adalah Ambiguity, kekaburan untuk memisahkan antara kebenaran dan kenyataan dapat memicu kesalahpahaman yang membawa tantangan baru sebagai dampak dari situasi yang terus dinamis berkembang.

- b. Sifat aparat Satkowil dengan Pembawaan Milenial sebagai modal bergaul dengan Generasi Z.

Memasuki era VUCA sekarang ini, istilah generasi milenial banyak diperbincangkan.

Ini adalah generasi yang lahir antara tahun 1980- 1995. Usianya saat ini sekitar 25 -40 tahun. Generasi milineal dinilai krusial karena saat ini mendominasi angkatan kerja kita. Selain itu, generasi ini mulai menapakkan kekuatannya di tangga kepemimpinan nasional dan daerah. Untuk memahami konflik kepentingan antara pemimpin senior dan dan pemimpin milenial, kita perlu memahami sudut pandang dan nilai-nilai generasi milenial tersebut. (Kornelsen, 2017).

Para akademisi dan peneliti menyebutnya sebagai Generasi Z. Mereka lahir di periode 1996-2010. Jika generasi milenial mayoritas terkoneksi oleh internet dalam separuh hidupnya, maka Generasi Z ini adalah mereka yang sejak lahir sudah terhubung oleh *World Wide Web*. Artinya, mereka sudah menjadi bagian dari Internet society sejak dari lahir. Saat ini, Generasi Z sudah berusia 10-24 tahun. Mayoritas mereka adalah remaja dan sebaya dengan anak-anak kita.

Jika kita mengalakkan nilai-nilai Pancasila dalam mencapai kejayaan Satu abad Bangsa Indonesia tahun 2045, maka Generasi Z ini pada saat itu akan berusia 35-49 tahun. Mereka inilah yang akan menempati posisi strategis kepemimpinan di Indonesia. Pada saat sekarang, generasi Z ini memerlukan penanaman nilai-nilai Pancasila Persatuan Indonesia dan tentunya akan, Generasi Z akan memiliki peran signifikan menjaga persatuan Indonesia dimasa depan.

Dari sisi ekonomi, Generasi Z memberikan kontribusi besar pada perputaran ekonomi dunia konsumen produk elektronik. Dari sisi politik, sebagian Generasi Z ini sudah memiliki hak pilih, sehingga bisa menentukan arah peta politik negara Indonesia. Di era VUCA, ancaman terhadap Negara Indonesia tak lagi hanya berwujud serangan tentara musuh, melainkan ancaman virus penyebaran ujaran kebencian, intoleransi, hoax, separatisme, termasuk radikalisme yang bisa mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia NKRI.

Semua itu tidak meluncurkan dari senjata api musuh, tetapi melalui jaringan didalam rumah kita yaitu media sosial.

Untuk membentengi generasi Milenial dan Generasi Z tersebut, terlebih dulu kita harus bisa berpikir dan bergerak seperti mereka. Untuk bisa berpikir seperti remaja, kita perlu memahami bagaimana cara kerja otak remaja. Faktor yang memengaruhi keberhasilan pembinaan Teritorial dalam optimasi pengamalan sila ke 3 (Tiga) Persatuan Indonesia adalah sifat pembawaan millenial, yang diterapkan aparat Komando Kewilayahan (Kowil) di wilayah binaannya. Kehadiran teknologi komunikasi yang telah membawa personil milenial, termasuk TNI-AD ke tingkat yang tidak terlihat sebelumnya perlu dicermati dengan prioritas pembinaan personil ke arah pembawaan Milenial tersebut untuk mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial secara optimal. Mereka diharapkan menjadi personil Satkowil yang sangat adaktif memanfaatkan teknologi yang rumit, lebih mampu dan aktif terlibat dalam perang informasi, tidak hanya untuk tujuan pertahanan kewilayahan tetapi juga dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Di tahun 2021 dan tahun-tahun ke depan di era VUCA, ancaman, tantangan bangsa Indonesia akan semakin berat dan tidak mungkin dapat ditanggulangi tanpa membangun kekuatan dan kolaborasi Milenial sipil dan militer yang mumpuni dan tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia. Aparat Satuan Komando Teritorial harus bisa memandang jauh ke masa depan, yaitu harus mulai memberikan perhatian pada generasi yang lebih muda dari generasi milineal tersebut.

- c. Sifat aktif menularkan “Virus Pancasila”. Dengan menyadari bahwa dalam era peperangan dengan proksi ini sasaran utama penaklukan suatu bangsa adalah serangan terhadap *Center of Gravity (COG)* sistem ketahanan ideologi negara, yaitu Pancasila.

Oleh karena itu, TNI, khususnya fungsi Pembinaan Teritorial sebagai pandu dan garda Republik harus mengukuhkan posisinya sebagai “*Defender Pancasila*”. Demi menjaga *Center of gravity (COG)* Pancasila sila ke-3 Persatuan Indonesia, TNI harus bertransformasi dari konsepsi patriotisme defensif menuju patriotisme offensif.

Semangat patriotisme offensive yang tidak hanya bersandar pada apa yang bisa kita hadapi, melainkan juga pada apa yang bisa kita kembangkan. Patriotisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Memperbaiki dan membangun ketahanan negara dengan cara mengaktualisasikan dan mengawal implementasi Pancasila, terutama sila 3 (Tiga) Persatuan Indonesia. Selain melanjutkan misi konvensionalnya sebagai korps bela negara secara defensif, TNI juga bisa mengembangkan korps bela negara secara progresif dalam mengamalkan Pancasila. Dengan cara demikian, kehadiran pembinaan teritorial TNI di era VUCA ini akan benar-benar dirasakan seluruh elemen bangsa Indonesia.

- d. Pembinaan Teritorial di dunia maya Era VUCA. Bagi Satkowil sebagai institusi yang bertugas dalam menangkal dinamika ancaman yang memecah belah persatuan Indonesia dengan menggunakan Cyber, merupakan tantangan yang harus dihadapi serta menuntut kecakapan para aparat Satkowil dalam membawakan peran pembinaan teritorial. Komunikasi adalah media yang selalu digunakan dalam metode Binter dan hendaknya harus memperhatikan aspek teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berbasis digital, perubahan tersebut diwadahi dalam padanan revolusi industry 4.0 dengan fitur-fitur yang meliputi aspek jaringan *World Wide Web*. Disinilah perlunya peran pembinaan teritorial Satkowil yang adaktif dan mampu

menampung segala aspirasi masyarakat dan sekaligus menjadikannya sebagai solusi.

Kerentanan pemecah persatuan dan kesatuan dapat bersumber dari dunia digital yang memang kaya akan kumpulan informasi dari media internet atau dikenal dengan nama IOT (*Internet of Thing*), kemudian dapat terlepas dari kontrol pemikiran dan menyebar menjadi arus intelijen karena terjadi berita penyebaran berita yang tidak sesuai dengan realita, sehingga memicu konflik social. Kerentanan dalam SARA mudah dimanfaatkan sehingga akan berkembang suatu paham yang bertentangan dengan Pancasila.

- e. Membangun Satkowil dan pemenuhan Personel dan perlengkapan. TNI AD sebagai Pembina wilayah teritorial didarat, maka penguasaan secara fisik tiap jengkal daratan tetap mutlak harus dilakukan. Agar peran, fungsi dan keberadaannya di wilayah dapat diandalkan, maka negara dituntut untuk dapat membangun Kodam, Korem, Kodim dan Koramil di seluruh wilayah yang belum memilikinya. Satkowil tersebut hendaknya dibangun mengikuti pemerintahan sipil dan dilengkapi dengan tipologi wilayah tersebut.
- f. Pembinaan Teritorial sebagai Pandu dan Garda Pancasila. Dengan menyadari bahwa dalam era peperangan dengan proksi ini sasaran utama penaklukan suatu bangsa adalah serangan terhadap sistem ketahanan ideologi negara (Latif, Yudi, 2020). Oleh karena itu, TNI, khususnya fungsi Pembinaan Teritorial (Binter) sebagai pandu dan garda Republik harus mengukuhkan posisinya sebagai “Pandu dan Garda Pancasila”. Konsepsi bela negara TNI harus bertransformasi dari konsepsi patriotisme “negatif-defensif” menuju patriotisme “positif-progresif”. Semangat patriotisme yang tidak melulu bersandar pada apa yang bisa kita lawan, melainkan juga pada apa yang bisa kita bangun. Patriotisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan melainkan juga memperbaiki keadaan negeri. Memperbaiki dan membangun ketahanan negara dengan

cara mengaktualisasikan dan mengawal implementasi Pancasila. Selain melanjutkan misi konvensional sebagai korps bela negara secara defensif, TNI juga bisa mengembangkan korps bela negara secara progresif dalam mengamalkan Pancasila. Dengan cara demikian, kehadiran Binter TNI akan benar-benar dirasakan seluruh elemen bangsa sebagai pandu dan garda Republik.

- g. Mendorong Sinergitas pembudayaan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini memerlukan pembudayaan pada berbagai komponen bangsa, baik kelompok profesi seperti Pegawai Negeri/Swasta/Buruh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tenaga kerja, dan kelompok fungsional lain sebagainya guna membudidayakan nilai-nilai Pancasila di lingkungannya.

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang merupakan asal-muasal dari karakter bangsa Indonesia, berarti mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu kedalam: 1) aktivitas serta tindakan terpola dari masyarakat, 2) gagasan, nilai, norma, dan peraturan, dan 3) wujud hasil cipta manusia. (Asmaroini, 2017).

Dalam Buku Ilmu Pertahanan, Syarifuddin Tippe berargumentasi bahwa prajurit TNI Bersama rakyat berjuang untuk mencegah Pancasila tidak tergantikan oleh upaya-upaya pihak lain yang akan menggantikannya dengan ideologi lain, sehingga kemudian dilekatkanlah simbol kesaktian Pancasila. Keyakinan terhadap kesaktian ideologi negara ini adalah yang abstrak dan filosofis. Sementara, perjuangan membela Pancasila secara fisik oleh TNI Bersama rakyat adalah fakta. (Tippe, 2015).

PENUTUP

Kesimpulan

Dinamika perkembangan lingkungan strategis kontemporer ini sangat memengaruhi pola ancaman yang semakin multi level dimensi. Realita perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Ipengtek), pada

tingkatan tertentu tingkat teknologi informasi tersebut berevolusi dan melahirkan dunia digital. Lingkungan sekitar kita mengalami keadaan VUCA, yaitu situasi penuh gejolak (*Volatility*), tidak pasti (*Uncertainty*), rumit (*Complexity*), dan kabur (*Ambiguity*) yang dipercaya akan membuat rentan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai Persatuan Indonesia. Diperlukan strategi optimasi secara semesta, di seluruh wilayah, oleh seluruh rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai Pancasila di Era VUCA.

Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, disarankan penelitian tentang sinergitas satuan Komando Kewilayahan dengan Pemerintah Daerah sampai level Desa/Kelurahan guna meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asmaroini, A. P. (2017). Menjaga Eksistensi Pancasila dan Penerapannya bagi Masyarakat di era Globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 9–15.
- [2] Asshiddiqie, J. (2006). Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi. *Jaringan Informasi Hukum*, 1, 1–23. jdih.ristekdikti.go.id/?q=system/files/perundangan/1927202140.pdf
- [3] Bakrie, C. R. (2020). Binter Milenial pada Era Vuca. In *Binter di Era Milineal* (pp. 22–27). Pusat Teritorial Angkatan Darat.
- [4] Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya* (Edisi ke-2). Kencana.
- [5] Cahyono, H. (2004). Negara dan masyarakat dalam resolusi konflik di Indonesia (Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah). *E.Jurnal LPI Resolusi Konflik*, 2, 1–8.
- [6] Cambridge Dictionary. (n.d.). *optimize*. Retrieved March 14, 2021, from <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/optimize>
- [7] Clausewitz, C. Von. (1976). *Carl Von Clausewitz On War*, (translated by Michael Howard and Peter Paret) (M. H. and P. Paret (ed.)). Princeton University Press.
- [8] Herin, F. P. (2019). *Mengenang 20 Tahun Konflik, mari belajar dari Maluku*. 21 Januari 2019. <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/01/21/mengenang-20-tahun-konflik-mari-belajar-dari-maluku/>
- [9] Kementerian Pertahanan. (2020). *Kebijakan Pertahanan Negara Tahun 2020*.
- [10] Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku putih Pertahanan Indonesia 2015*. In *Kementrian Pertahanan Republik Indonesia*. Kementerian Pertahanan RI.
- [11] Kornelsen, J. (2017). The Quest to Lead (with) Millenials in a VUCA-Wolrd: Bridging the Gap Between Generations. In S. C. Van Den Kok, Jacobus & Heuvel (Ed.), *Leading in a VUCA World Integrating Leadership, Discernment and Spirituality* (pp. 27–42). Springer Open.
- [12] Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespitohadi, W. (2019). Transformasi Konflik Sosial Antara Etnis Bali Dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian Di Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(1), 91. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v9i1.501>
- [13] Lebo, D., & Anwar, S. (2020). Pemberdayaan komunitas siber oleh Pemerintah Republik Indonesia dari perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Strategi Pertahanan Semesta*, 6(1), 101–127.
- [14] Marsono & Legionosuko, T. (2020). *Teori Strategi: Dari berbagai Ahli*. Unhan Press.
- [15] Muin, Fatkhul & Karsa, P. L. (2017). Sistem Ketahanan Nasional Berbasis nilai-nilai Philosophische Grondslag (Pancasila). In S. Aritonang (Ed.),

- Seminar Nasional Bela Negara* (p. 58). Unhan Press.
- [16] Mulyadi, & Risman, H. (2020). The 1962 Military Confrontation on Salvaging West Papua: An Analysis on War Theory. *Journal of Social and Political Sciences*, 3(4), 1092–1099. <https://doi.org/10.31014/aior.1991.03.04.240>
- [17] Mustarom, K. (2014). *Perang Generasi Keempat: Mengubah paradigma Perang*. Lembaga kajian Syamina.
- [18] Octavian, A. (2012). *Militer dan Globalisasi: Studi sosiologi militer dalam konteks globalisasi dan kontribusinya bagi Transformasi TNI* (kedua). UI Press.
- [19] Prabowo, J. S. (2009). *Pokok-Pokok Pemikiran tentang Perang Semesta*. Pusat Pengkajian dan Strategi Nasional.
- [20] Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa, Kementerian Pendidikan Nasional.
- [21] Said, S. (2006). *Militer Indonesia dan Politik; Dulu, Kini dan Kelak* (Kedua). Pustaka Sinar Harapan.
- [22] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- [23] Supriyatno, M. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- [24] Tipe, S. (2015). *Ilmu Pertahanan: Sejarah, Konsep, Teori, dan Implementasi*. Penerbit Salemba Humanika.
- [25] Undang-undang Nomor 3. (2002). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*. Sekretariat Negara.
- [26] Undang-Undang Nomor 34. (2004). *Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*. Sekretariat Negara. <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN